

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau suatu realitas, sebuah kelompok (*genus*) atau seorang individu.<sup>1</sup> Manusia dilahirkan menjadi makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, sekumpulan manusia di dalam satu lingkup lingkungan disebut dengan masyarakat. Seorang tokoh sosiologi modern, Talcott Parson, merumuskan kriteria masyarakat. Masyarakat ialah suatu sistem sosial yang melebihi masa hidup individual normal dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.<sup>2</sup>

Dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan dewasa ini sangat berkembang cepat, dimana diperlukan akselerasi tugas dan pembagian peran yang tepat diantara seluruh pihak pemangku kepentingan, baik pemerintah sebagai regulator, dunia usaha sebagai motor penggerak pembangunan, dan masyarakat itu sendiri sebagai pelaksana pembangunan.

Kehidupan untuk bersosial tersebut terkristalisasi dalam sebuah lembaga sosial masyarakat yang berdasarkan kesamaan pandangan, keinginan, juga gagasan. Kesamaan tersebut dilembagakan yang salah satunya disebut organisasi kemasyarakatan ormas.

---

<sup>1</sup> Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 11.

<sup>2</sup> Dikutip dari Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, edisi ke II, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1996, hlm.56

Organisasi kemasyarakatan yang didalamnya terdapat sumber daya manusia yang memiliki kesamaan tadi, berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam kesamaan pandangan.

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia adalah Front Pembela Islam atau yang disingkat (FPI). FPI ialah organisasi masyarakat Indonesia yang mengusung pandangan Islamisme. Pandangan tersebut dikedepankan dalam proses berdirinya pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di Jakarta Selatan oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh, dan Aktivistis Muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek.<sup>3</sup>

FPI merupakan organisasi masa keagamaan Islam yang peran dan kiprahnya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia. Dalam perannya FPI memegang prinsip '*amar ma'ruf nahi munkar*' yang linear dengan kiprahnya dalam penegakkan perintah Allah SWT untuk pemberantasan maksiat di Indonesia.

Asas organisasi FPI berasaskan Islam yang diturunkan dalam visi dan misi organisasinya, yaitu penerapan syariat Islam secara *kaffah* dibawah naungan *khilafah Islamiyah* menurut *manhaj nubuwah*, melalui pelaksanaan *da'wah*, penegakkan *hisbah* dan pengamalan jihad.<sup>4</sup>

Dalam perjalanannya Ormas FPI telah mengalami beberapa dinamika permasalahan yang datang dalam lingkup kemasyarakatan. Dinamika yang

---

<sup>3</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Front\\_Pembela\\_Islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam) 22 Maret 2017

<sup>4</sup> AD ART Front Pembela Islam per 19 februari 2015.

terdapat di FPI bagi penulis dititikberatkan pada konsep dan gerakan FPI yang dilihat dalam kaca mata payung hukum, yaitu Siyasah Dusturiyah.

Berbagai pandangan pun berdatangan dari masyarakat, pandangan tersebut dilihat segi positif contohnya dengan membantu khlayak banyak yang terkena musibah seperti Bencana Tsunami di Aceh, Gempa di Yogyakarta, maupun segi negatif contohnya dengan beberapa aksi – aksi yang dijalani oleh Front Pembela Islam ini terbilang keras.

Karena aksi-aksi kekerasan itu meresahkan masyarakat, termasuk dari golongan Islam sendiri, beberapa ormas menuntut agar Front Pembela Islam dibubarkan. Melalui kelompok surat elektronik yang tergabung dalam forum wanita-muslimah mereka mengirimkan petisi pembubaran Front Pembela Islam dan ajakan bergabung. Menurut mereka walaupun Front Pembela Islam membawa nama agama Islam, pada kenyataannya tindakan mereka bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islami, bahkan tidak jarang menjurus ke Vandalisme.<sup>5</sup>

Memandang permasalahan di dalam khilafah yang ingin ditegakkan oleh FPI dan juga dalam penerapan Syariat Islam secara kaffah menjadi pembicaraan panjang di kalangan masyarakat sekarang ini.

Serangkaian permasalahan yang telah diuraikan diatas. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN ASAS, VISI DAN MISI FRONT PEMBELA ISLAM DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

---

<sup>5</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Front\\_Pembela\\_Islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam) 22 Maret 2017

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang sudah penulis uraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian pada kajian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Asas, Visi dan Misi Front Pembela Islam (FPI) ?
2. Bagaimana pandangan beberapa Tokoh Masyarakat terhadap pelaksanaan Asas, Visi dan Misi Front Pembela Islam (FPI) ?
3. Bagaimana tinjauan dari Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Asas, Visi dan Misi Front Pembela Islam (FPI) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Asas, Visi dan Misi Front Pembela Islam.
2. Mendeskripsikan pandangan beberapa Tokoh Masyarakat terhadap pelaksanaan Asas, Visi dan Misi Front Pembela Islam (FPI).
3. Mendeskripsikan tinjauan dari Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Asas, Visi dan Misi Front Pembela Islam (FPI).

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan Asas, Visi dan Misi Front Pembela Islam.
2. Mengetahui pandangan beberapa Tokoh Masyarakat terhadap pelaksanaan Asas, Visi dan Misi Front Pembela Islam (FPI).
3. Mengetahui tinjauan dari Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Asas, Visi dan Misi Front Pembela Islam (FPI).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kajian organisasi memberikan pemahaman tentang organisasi sebagai subjek dan objek budaya. Jika studi perilaku keorganisasian berdasarkan anggapan bahwa organisasi berperilaku sendiri, berbeda dengan perilaku orang-orang yang membentuknya, maka sejajar dengan itu, organisasi berperilaku sendiri, berbeda dengan perilaku orang-orang yang membentuknya, maka sejajar dengan itu, organisasi juga mempunyai budaya sendiri (BO), berbeda dengan budaya orang-orang yang berkemungkinan dengannya. BO terbentuk dari karakteristik organisasi sebagai objek dan subjeknya.<sup>6</sup>

Organisasi berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani, yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, dan pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip. Sebagai bahan perbandingan, berikut akan disampaikan beberapa pengertian organisasi dari para ahli tersebut, antara lain :

1. Menurut Chester I. Barnard dalam bukunya, *The Executive Functions* mengemukakan bahwa "Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih (*Organization as a system of cooperatives of two more persons*)".<sup>7</sup>
2. Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, "Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu".<sup>8</sup>
3. Menurut Litterer melihat organisasi dalam kaitannya dengan sistem kemasyarakatan. Ia memandang organisasi sebagai sesuatu yang

---

<sup>6</sup> Taliziduhu Ndaraha, *Op.Cit*, hlm. 52

<sup>7</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 18.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 19.

diciptakan masyarakat atau alat yang dikembangkan oleh manusia untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai selain dengan cara itu. Organisasi terdiri atas berbagai macam komponen: orang, pengetahuan, dan biasanya juga berbagai macam materi; kesemuanya diatur dalam suatu struktur serta sistem tertentu sehingga menjadi suatu kesatuan yang terintegritas.<sup>9</sup> Organisasi dipandang sebagai salah satu komponen dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan komponen lain yang ada di masyarakat. Organisasi tidak saja berkepentingan dengan urusan internal organisasi yang bersangkutan tetapi juga berkepentingan dengan faktor yang ada di luar organisasi. Dengan kata lain organisasi dipengaruhi dan juga mempengaruhi lingkungan.<sup>10</sup> Organisasi dalam pengertian seperti itu sampai sekarang dianggap paling relevan karena paling mewakili keadaan yang sesungguhnya. Dalam kenyataannya organisasi bukanlah sekedar struktur atau kerangka kerja di mana para anggota bekerja satu sama lain, bukan pula sekedar proses hubungan kerja sama antar anggota. Keduanya memang merupakan bagian penting dari kehidupan sebuah organisasi, tetapi di luar itu perlu disadari bahwa organisasi juga berdiri di antara organisasi-organisasi lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. *Input*-nya datang dari masyarakat (bisa jadi organisasi lain) dan *output*-nya pun diserap oleh masyarakat (bisa jadi organisasi lain pula).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhyadi, *Dinamika Organisasi Konsep dan Aplikasinya Dalam Interaksi Sosial*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 52.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 56.

Budaya organisasi keagamaan ialah pola pikir dan perilaku efisien yang diulang terus-menerus untuk mencapai kebaikan. Tujuan akhir organisasi keagamaan ialah mencari kebaikan; semua anggotanya berpikir dan berperilaku berdasar ukuran baik-buruk, yang baik dipikirkan dan dikerjakan, sebaliknya yang buruk ditinggalkan.<sup>12</sup>

Sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat, organisasi keagamaan (keyakinan) kepada Supra Netural adalah yang paling tua yaitu : (1) Religi (adat) adalah kepercayaan lokal (atau agama lokal) merupakan budaya, hasil interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, (2) agama adalah kepercayaan dari WAHYU TUHAN.<sup>13</sup> Hubungan Input-Proses-Output Organisasi Keagamaan (WAHYU) ialah<sup>14</sup> :

- a. Organisasi masyarakat beragama adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sifatnya penyerahan diri.
- b. Masyarakat beragama, alat kerjanya modern, kebutuhan hidupnya kompleks, dan harus diupayakan atau diperjuangkan. Oleh sebab itu organisasinya formal, dipimpin oleh Pemuka Agama
- c. Pemuka agama adalah orang yang paling memahami WAHYU TUHAN dan paling banyak pengetahuannya.
- d. Masyarakat beragama memenuhi kebutuhan hidupnya secara interpedensi, mereka memproduksi untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dipertukarkan (diperdagangkan), oleh sebab itu masyarakat yang demikian sifatnya terbuka.

---

<sup>12</sup> Darsono P, *Budaya Organisasi*, Nusantara Consulting, Jakarta, 2010, hlm. 59

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 62-63

- e. Input organisasi adalah bahan bakunya umat beragama, tenaga kerja yaitu para guru agama, alat kerja (sekolah), informasi dari WAHYU TUHAN, metode kerjanya pembinaan rohani, kekuatan iman, dan kepemimpinan yaitu para ahli pendidikan agama.
- f. Outputnya adalah Taqwa kepada TUHAN YANG MAHA KUASA.
- g. Output ditransformasikan kepada seluruh umat beragama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, yang dibina oleh Pemuka Agama.
- h. Pemimpin masyarakat beragama mendorong dan mengarahkan anggotanya untuk bekerja efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu Taqwa kepada TUHAN YANG MAHA KUASA
- i. Karena efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan, maka di ulang terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan hidup beragama yang kemudian membentuk karakter masyarakat yang tunduk dan patuh kepada TUHAN YANG MAHA KUASA.

Organisasi massa ialah sekumpulan orang yang bertujuan mengadakan perbaikan kehidupan; tujuan akhir organisasi massa ialah mencari perbaikan kehidupan, semua anggotanya berpikir dan berperilaku berdasar ukuran kesejahteraan.<sup>15</sup>

Sensasi, berfikir, dan memori menentukan persepsi. Persepsi adalah penyimpulan dan penafsiran obyek atau peristiwa. Untuk dapat menyimpulkan dan menafsirkan obyek atau peristiwa harus didahului oleh sensasi, sensasi adalah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 63



kemampuan indera menangkap obyek atau peristiwa kemudian melahirkan pengalaman dan pengetahuan.<sup>16</sup>

Persepsi manusia terhadap obyek atau peristiwa ditentukan oleh beberapa unsur antara lain sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. Ideologi, yaitu keyakinan berdasar ilmu pengetahuan
- b. Kebiasaan (pola perilaku), yaitu pola perilaku efektif untuk mencapai tujuan
- c. Kesiapan mental, yaitu kesiapan mental terhadap apa yang ingin dipersepsi
- d. Motivasi, yaitu kekuatan pendorong untuk memperhatikan obyek
- e. Keragaman stimuli, yaitu makin beragam makin kurang tajam persepsinya
- f. Situasi, yaitu kondisi yang dapat mengubah perhatian

Persepsi ditentukan oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional adalah meliputi kebutuhan dan pengalaman individu. Pengalaman yang diulang-ulang secara terus-menerus menjadi kebiasaan dan membentuk karakter individu dan selanjutnya menentukan persepsi atas obyek atau peristiwa. Faktor struktural adalah sistem syaraf atau sistem pemikiran menentukan persepsi. Memperepsi sesuatu harus secara keseluruhan, atau jika kita ingin memberi makna obyek atau peristiwa kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah, kita harus memandang saling hubungan fakta yang satu dengan yang lainnya seacara

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 101

menyeluruh. Untuk memahami manusia, kita harus menempatkan dalam kehidupan riilnya dan kebudayaannya.<sup>18</sup>

Masyarakat selalu mempunyai seseorang yang dituakan sebagai penasehat atau tempat pelarian dalam masalah-masalah yang datang di kalangan masyarakat, seseorang tersebut menjadi acuan setiap masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungannya. Seseorang yang dihormati dalam kalangan masyarakat tersebut disebut tokoh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol menyebutkan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.<sup>19</sup> Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal kepolisian masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.<sup>20</sup>

Untuk mengetahui tokoh yang ada di dalam masyarakat ada beberapa teknik yang bisa dilakukan diantaranya<sup>21</sup> :

1. Teknik sosiometri

Teknik ini dapat dilakukan dengan bertanya kepada anggota masyarakat kepada siapa mereka meminta nasihat atau mencari informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan yang mereka

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol, hal.2

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal. 22

<sup>21</sup> <http://Pengetahuanumum789.blogspot.com/2016/06/definisi-tokoh-masyarakat-dan.html> 30 september 2017

hadapi. Pemimpin dalam hal ini adalah mereka-mereka yang banyak disebut oleh responden.

## 2. Teknik Informan`s Rating

Dalam menggunakan teknik ini, pada prinsipnya sama dengan sosiometri. Tetapi yang ditanya bukan anggota masyarakat, melainkan orang yang dianggap narasumber disana yang dianggap mengenal baik situasi sistem sosial.

## 3. Teknik Self Designeting

Dalam teknik ini kepada setiap responden diajukan serangkaian pertanyaan untuk menentukan seberapa jauh ia menggap dirinya sebagai pemimpin dalam masyarakatnya. Teknik ini bergantung pada keakuratan responden dalam pengenalan dirinya sendiri dan pengutaraan khayal pribadi mereka.

Maka dari itu para pemimpin (tokoh masyarakat) aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi dan komunikasi tatap muka lainnya. Dalam forum-forum seperti itulah gagasan-gagasan baru itu dikomunikasikan. Dapat diharapkan bahwa pengikut mencari pemimpin yang agak tinggi status sosialnya daripada dirinya sendiri, dan memang rata-rata tokoh masyarakat itu lebih tinggi status sosialnya.<sup>22</sup> Tokoh masyarakat yang dimaksud penulis ialah eksekutif yang berada di Ormas dalam lingkup nasional.

Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan *principle*, sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas dapat berarti hukum dasar atau fundamen,

---

<sup>22</sup> *Ibid*

yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita.<sup>23</sup>

Menurut Liang Gie, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyorakan cara – cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkainya perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.<sup>24</sup>

Visi dan misi merupakan sebuah rangkaian filosofi atau tujuan yang ditetapkan suatu organisasi sebagai arah tujuan kemana organisasi atau perusahaan akan dibawa.<sup>25</sup> Visi adalah kondisi masa depan yang masih abstrak, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang.<sup>26</sup> Visi merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan suatu organisasi pada masa yang akan datang dan dibuat sebagai pedoman atau arah tujuan jangka panjang organisasi.<sup>27</sup> Definisi misi menurut Arman (2008) adalah sebagai berikut, Misi adalah pernyataan – pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini.<sup>28</sup>

Pelaksanaan menurut The Liang Gie, adalah usaha – usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat – alat yang

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 70.

<sup>24</sup> Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2002, hlm. 14.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 130.

<sup>27</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id> 20 Juli 2017

<sup>28</sup> *Ibid*

diperlukan, dan bagaimana cara dilaksanakannya.<sup>29</sup> Kemudian SP. Siagian, menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*Achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu<sup>30</sup> :

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan – peraturan dan prosedur – prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya rencana teknis menjadi rencana praktis dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas – tugas dan sumber – sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal – hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil – hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil – hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas – tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

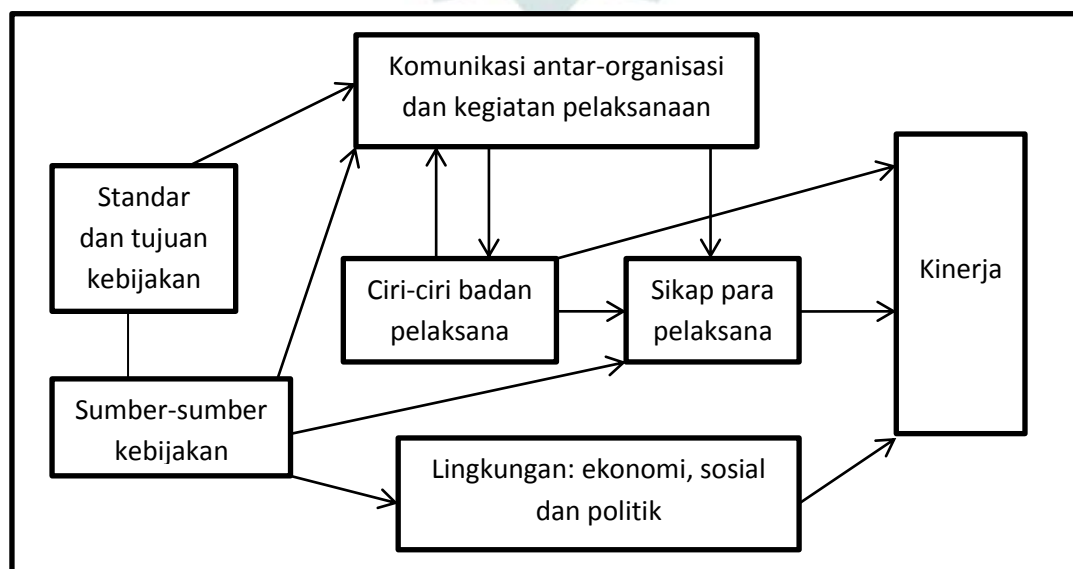
Pelaksanaan bisa disebut juga dengan implementasi. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.

<sup>29</sup> The Liang Gie, dan sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta, 1997, Hlm. 191.

<sup>30</sup> P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, Hlm. 120

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>31</sup>



Gambar 1.1

<sup>31</sup> Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 65

Organisasi dalam prakteknya mencapai sasaran dan tujuan, sering melakukan penyimpangan. Oleh sebab itu proses pencapaian sasaran dan tujuan harus diperbaiki terus-menerus agar proses tersebut berjalan efektif dan efisien.<sup>32</sup>

Tujuan akhir suatu organisasi tergantung jenis organisasi; organisasi politik tujuannya adalah mencari kekuasaan (merebut kekuasaan negara); organisasi bisnis tujuannya adalah mencari laba; organisasi massa tujuannya adalah perbaikan ekonomi atau perbaikan nasib; organisasi keagamaan tujuannya adalah mencari kebaikan di dunia dan akhirat; organisasi keilmuan tujuannya adalah mencari kebenaran.<sup>33</sup>

Salah satu upaya untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah dengan adanya mukmin yang berjuang dalam sebuah bangunan yang kokoh. Ciri dari bangunan yang kokoh adalah seluruh komponen di dalamnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya, demikian disebut dengan organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an surat Al-Shaff ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.<sup>34</sup>

Dalam hadits diterangkan :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يَتَّقَهُ

<sup>32</sup> Darsono P, *Op. Cit*, hlm. 58

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, 2005, hlm. 551

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas.” (HR. Thabrani)<sup>35</sup>

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pembahasan tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memustkan perhatian pada aspek pengaturan.<sup>36</sup> Secara bahasa siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, memerintah dan memimpinnya. Siyasah sendiri mempunyai makna mengatur urusan umat. Politik dilaksanakan, baik oleh negara (pemerintah) maupun umat (masyarakat). Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat melaksanakan kewajiban sekaligus *muhasabah* (mengoreksi) negara dalam melaksanakan tugasnya.<sup>37</sup> Pengertian Siyasah adalah :

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”.<sup>38</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf “objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari

<sup>35</sup> [www.ibnushobah.web.id/2012/10/pengorganisasian-dalam-perspektif-al.html?m=1](http://www.ibnushobah.web.id/2012/10/pengorganisasian-dalam-perspektif-al.html?m=1) 24 Maret 2017

<sup>36</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 29.

<sup>37</sup> A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 75.

<sup>38</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Gunung Djati Press, Bandung, 2000, hlm. 24



segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

Siyasah Dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.<sup>40</sup> Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>41</sup>

Kajian tentang pelaksanaan di dalam Siyasah Dusturiyah adalah bagian *tanfidziyah*, dimana *tanfidziyah* ini masuk kedalam sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi*. Oleh karena itu hubungan rakyat dan pemerintahan masuk kedalam sistem *tanfidziyah* di kajian Siyasah Dusturiyah.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* diatas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta *maqasid syari`ah* yang menjadi ide dasar pengethauna mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.<sup>42</sup> Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus-menerus

---

<sup>39</sup> A. Dzajuli, Op.Cit., hlm. 30

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 23

berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.<sup>43</sup>

Dalil-dalil *ijtihadiah* yang dijadikan sandaran berujung pada kaidah sebagai berikut :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

” Kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”.<sup>44</sup>

Ada beberapa prinsip – prinsip nomokrasi Islam yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

#### 1. Prinsip Kedudukan Manusia Di Bumi

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-Nya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (QS. *Al-Baqarah*, 2:30, *Al-An'am*, 6:165, *Yunus*, 10:14, dan lain-lain). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

#### 2. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang dikembangkan di pundaknya (QS, *An Nisa*, 4:58). Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan

<sup>43</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 24

<sup>44</sup> Abdul Mujid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, hlm. 6

perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>45</sup>

### 3. Prinsip Penegakan Keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur`an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *Al-Adl* saja, tetapi juga kata-kata *Al-Wazn/Al-Mizan*, *Al-Qisth*, dan *Al-Wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan suatu yang harus diperjuangkan dan ditegakan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan tidak dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan adalah surat *An-Nisa 4:58, 105*, dan *135*, *An-Nahl 16:90*, dan *Al-Maidah 5:6*.

### 4. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketia setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu sebabnya, pada surat *An-Nisa 4:59* Allah merangkaikan kata “*athi`u*” hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada pemimpin (*uli al-amr*)

---

<sup>45</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, Hlm. 16.

#### 5. Prinsip *Amar Ma`ruf Nahy Munkar*

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat (*QS. Ali-Imran 3:104*). Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam demokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi, dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

#### 6. Prinsip Penegakan HAM

Dalam demokrasi Islam, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah untuk memeluk dan menganut suatu agama. Dalam hal ini Al-Qur`an memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya. (*QS. Al-Baqarah 2:256*).<sup>46</sup>

### **F. Langkah – Langkah Penelitian**

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm. 17

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan tidak boleh mengisolasi individu atau kelompok ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.<sup>47</sup>

Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A mensintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>48</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini Kota Jakarta adalah lokasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan lokasi tersebut dekat dengan ruang lingkup peneliti, lebih terjangkau wilayahnya dan menjadi pusat Markas Besar Front Pembela Islam (FPI).

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 4

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 6

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>49</sup>. Penulis dengan ini menggunakan metode wawancara sebagai data primer serta data dari sumber – sumber yang sudah ada untuk membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

#### a. Sumber data primer

- 1) AD/ART FPI
- 2) Responden tokoh masyarakat
- 3) Wawancara dengan Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta
- 4) Data-data yang diperoleh dari Markas Besar Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada. Maka penulis mengambil data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, koran/tabloid, dan informasi dari internet

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang dipergunakan maka teknik pengumpulan dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>49</sup> Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*, cetakan XI, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 114.

- a. Observasi, yaitu studi yang di sengaja dari sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Penulis langsung terjun ke lapang untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan FPI menjalankan asas, visi dan misi organisasi pada 23 Mei – 23 Juli 2017
- b. Interview, yaitu percakapan dengan tatap muka dengan tujuan memperoleh informasi yang faktual untuk menafsirkan dan menilai keterangan dari key informasi (informasi kunci) seperti dari civitas FPI, dan lainnya. Penulis datang langsung ke kantor DPP FPI untuk bertabayyun sekaligus mencari informasi tentang pelaksanaan asas, visi dan misi organisasi pada 27 Oktober - 1 Nopember 2017 serta penulis juga bertabayyun kepada beberapa tokoh masyarakat untuk mencari tahu tanggapan tentang pelaksanaan asas, visi, dan misi FPI pada 17 Nopember - 17 Desember 2017.
- c. Studi pustaka, yaitu mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah atau informasi lain dari buku-buku, dan literatur lain yang bisa membantu. Penulis mencari, mengumpulkan, dan menganalisis buku-buku, media massa, ataupun internet yang memang berkaitan dengan organisasi FPI, pelaksanaan, dan Siyasah Dusturiyah.

## 5. Analisis Data

- a. Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian

- b. Menafsirkan data yang sudah diklasifikasikan dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) berdasarkan kerangka pemikiran
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan maksud pembahasan serta tujuan penelitian.

